

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan mengurangi pengangguran. Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau negara merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, ketimpangan tersebut terlihat dengan adanya wilayah yang mengalami pertumbuhan cepat sementara wilayah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Dalam implementasi proses pembangunan, antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, seperti menjadi *trade off* sebagai tujuannya (Badriah, 2019).

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus meningkat disetiap tahunnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat PDB Indonesia dengan harga konstan senilai Rp 10,95 ribu triliun rupiah pada tahun 2019. Dengan kenaikan rata-rata tahunan 14,43%, angka tersebut naik pada tahun 2020 menjadi Rp 15,43 ribu triliun rupiah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin sejahtera secara ekonomi. Akan tetapi, kesejahteraan tersebut ternyata belum mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia karena adanya ketimpangan pendapatan yang masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. BPS juga mencatat bahwa rasio gini di Indonesia masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung menurun.

Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu fokus yang ingin dicapai

oleh seluruh negara di dunia. Ketimpangan pendapatan merupakan perbandingan pendapatan yang relatif antara warga negara berpendapatan tinggi dengan berpendapatan rendah. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadi pada semua negara maju dan negara berkembang (Pradana, 2018). Berikut adalah grafik ketimpangan pendapatan seluruh provinsi di Indonesia:

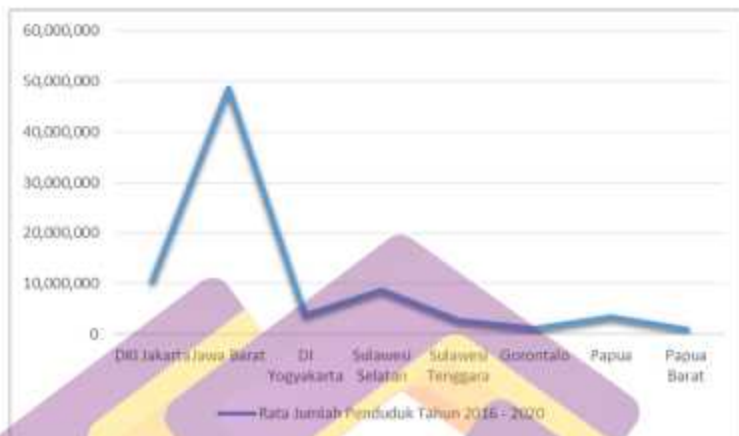


Gambar 1.1 Grafik Ketimpangan Pendapatan Seluruh Provinsi
Sumber: Badan Pusat Statistik Indeks Gini, BPS Indonesia, 2020

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 diatas, ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami fluktuasi di tahun 2016 hingga tahun 2020. Ada 8 provinsi di Indonesia yang masih memiliki ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional sebesar 0,38. Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa 8 provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,43, Provinsi Gorontalo sebesar 0,41, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,40, Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,39, Provinsi Papua sebesar 0,39, Provinsi Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara sebesar 0,39, dan terakhir Provinsi Papua Barat sebesar 0,38. Kemudian sisanya sebanyak 26 Provinsi di Indonesia tercatat memiliki tingkat ketimpangan pendapatan dibawah rata-rata nasional, artinya 26 provinsi tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari keadaan jumlah penduduk yang merupakan penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap ketimpangan, akan tetapi hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika mampu menekan dan mengupayakan tingkat jumlah penduduk sehingga ketimpangan diharapkan akan berkurang.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dari kondisi demografis pada suatu daerah yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Kondisi demografis yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Ihtiyath, 2018). Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu jumlah penduduk. Secara umum yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. Berikut adalah grafik jumlah penduduk di 8 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tinggi di Indonesia:



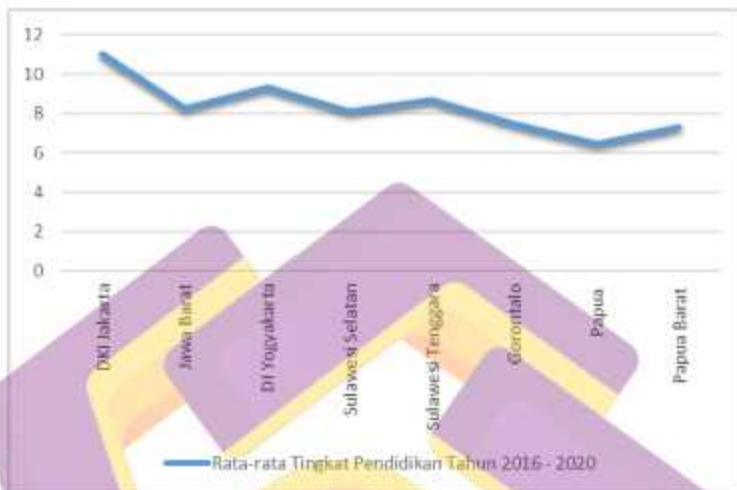
Gambar. 1.2 Grafik Rata-rata Jumlah Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk, BPS Indonesia, 2020

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penduduk di 8 Provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada gambar 1.2 diatas Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi diantara 8 provinsi lainnya yaitu sebanyak 49 juta jiwa pada tahun 2020 dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi nomor 3 di Indonesia. Kemudian provinsi dengan jumlah penduduk yang rendah diantara 8 Provinsi lainnya adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 981 ribu jiwa pada tahun 2020 dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi nomor 8 di Indonesia.

Selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan menjadi ukuran dalam menentukan tingkat upah yang berkontribusi cukup besar terhadap distribusi pendapatan (Nadya dan Syafri, 2019). Berikut adalah grafik rata-rata

tingkat pendidikan menurut rata-rata lama sekolah tahun 2016 – 2020:



Gambar 1.3 Grafik Rata-rata Tingkat Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Tingkat Pendidikan, BPS Indonesia, 2020

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan menurut rata-rata lama sekolah pada 8 provinsi di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah di provinsi DKI Jakarta menjadi tertinggi diantara 8 provinsi di atas yaitu 11 tahun dalam 5 tahun terakhir hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta masih banyak yang belum menyelesaikan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Provinsi dengan rata-rata sekolah terendah diantara 8 provinsi di atas adalah Provinsi Papua yaitu sekitar 6,5 tahun dalam waktu 5 tahun terakhir. Artinya bahwa pendidikan terakhir rata-rata penduduk Provinsi Papua adalah Sekolah Dasar (SD), hal tersebut disebabkan oleh akses untuk memperoleh pendidikan yang sulit dan tuntutan ekonomi masyarakat Papua.

Kemudian yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan selain jumlah penduduk dan tingkat pendidikan adalah upah minimum regional. Upah Minimum Regional juga mempunyai peranan penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan penelitian Anshari, Dkk (2018) menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini karena setiap peningkatan yang terjadi pada upah minimum maka ketimpangan pendapatan akan menurun. Berikut adalah grafik upah minimum regional di 8 Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional:



Gambar 1.4 Grafik Rata-rata Upah Minimum Regional
 Sumber: Badan Pusat Statistik UMR Indonesia, BPS Indonesia. 2020

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum regional di Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata upah tertinggi diantara 8 provinsi tersebut yaitu sebesar 4,2 juta rupiah pada tahun 2020. Sedangkan provinsi dengan rata-rata upah rendah yaitu provinsi DI Yogyakarta

sebesar 1,7 juta rupiah pada tahun 2020. Akibatnya Provinsi DI Yogyakarta mengalami ketimpangan pendapatan tertinggi nomor satu di Indonesia karena rata-rata upah minimum DI Yogyakarta relatif rendah yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Tabel hasil analisis rata-rata ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan UMR pada 8 provinsi di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Analisis Rata-rata Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan UMR Pada 8 Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2016 – 2020

Provinsi	KP	JP	TP	UMR
DI Yogyakarta	0,43	3.802.234 jiwa	9,3 tahun	Rp 1.480.995
Gorontalo	0,41	1.175.752 jiwa	7,5 tahun	Rp 2.256.932
Jawa Barat	0,40	48.670.729 jiwa	8,2 tahun	Rp 1.551.212
DKI Jakarta	0,39	10.453.427 jiwa	11 tahun	Rp 3.664.221
Papua	0,39	3.321.981 jiwa	6,5 tahun	Rp 2.971.249
Sulawesi Selatan	0,39	8.748.252 jiwa	8 tahun	Rp 2.659.515
Sulawesi Tenggara	0,39	2.653.475 jiwa	8,6 tahun	Rp 2.186.712
Papua Barat	0,38	937.556 jiwa	7,3 tahun	Rp 2.643.120

Sumber: BPS Indonesia. 2020

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa hubungan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum regional dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, sehingga diperlukan adanya upaya mengatasi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang ketimpangan pendapatan dengan penelitian skripsi berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Regional Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian diantaranya variabel Dependen (Y) merupakan Ketimpangan Pendapatan. Sedangkan variabel Independen (X) diantaranya

Jumlah Penduduk (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Upah Minimum Regional (X3).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 – 2020 terjadi suatu fenomena, di mana ketimpangan pendapatan di beberapa provinsi Indonesia mengalami fluktuasi di tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu 8 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan di atas rata-rata nasional. Keadaan ini berdampak pada perbedaan pendapat antara golongan kaya dengan golongan miskin yang semakin melebar di setiap tahunnya. Faktor jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum regional sehingga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang terjadi pada 8 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia ?
- b. Bagaimana Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia?
- c. Bagaimana Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta dan menjadi awal pembelajaran, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum regional terhadap ketimpangan pendapatan pada 8 provinsi di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang sedang terjadi di Indonesia khususnya 8 provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan diatas rata-rata nasional.

c. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa atau peneliti selanjutnya, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, khususnya di bidang ilmu ekonomi.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca sebagai referensi mengenai pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum regional terhadap ketimpangan pendapatan.

1.5. Sistematika Bab

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi penelitian secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan atau bab yang merupakan kerangka sebagai pedoman penulisan skripsi penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Penelitian

Bagian awal memuat halaman judul, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman ringkasan.

2. Bagian Utama Penelitian

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini meliputi landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian pendapatan asli daerah, tenaga kerja, belanja pemerintah, kemudian berisi telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, kerangka konseptual dan hipotesis

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi agar sistematis, pada bab metode penelitian meliputi sebagai berikut: Objek Penelitian, Jenis, Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Teknik Analisis Data

3. Bagian Akhir Proposal Penelitian

Bagian akhir dari proposal penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran bila ada.